**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang disebut Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Badan daerah dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional. Untuk memudahkan suatu Badan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya tentu dibutuhkan pegawai yang berkualitas.

Pegawai membutuhkan timbal balik yang berupa penghargaan atas kontribusi yang dilakukannya. Penghargaan yang dibutuhkan pegawai biasanya dalam bentuk program kompensasi yang sesuai. Kebijakan kompensasi selain memberikan imbalan pada pegawai atas pekerjaan yang dilakukan juga dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan potensi pegawai. Oleh karena itu, pemberian kompensasi perlu mendapat perhatian khusus dan dilaksanakan atas dasar kepentingan pegawai.

Kinerja pegawai yang efektif membuat lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja pegawai dapat berdampak positif terhadap perilaku, seperti misalnya tingkat kedisiplinan, semangat kerja yang cenderung meningkat dan juga berhubungan dengan kualitas yang baik. Kinerja pegawai menjadi salah satu faktor individu dan sarana untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Bahkan dalam ruang lingkup manajemen, kinerja pegawai menjadi hal utama yang dapat menentukan tercapainya tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung berfungsi sebagai unit pelaksana untuk mengkoordinasikan urusan pemerintah dalam bidang keuangan. Selain fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan BPPD memiliki fungsi dan tugas lainnya. Tugas utama dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai badan pengelola pendapatan daerah sesuai dengan asas otomi daerah dan undang-undang yang berlaku. Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dibentuk dengan tujuan dan sasaran. Tujuannya untuk mengoptimalisasi pengelolaan pajak daerah, mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah, tercapainya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pajak daerah. **Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki sasaran seperti, te**rcapainya target pendapatan pajak daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah, meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pajak daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki **visi “**Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel”, serta memiliki **misi untuk** meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Menjalankan visi dan misi tersebut dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjajagan yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan yaitu kinerja pegawai yang tidak maksimal sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari dimensi kinerja pegawai yaitu ketepatan waktu, sebagai contoh kepala bidang PAD I yang dalam tugasnya yaitu penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan lingkup survei (laporan survei mingguan) diharuskan menyelesaikan tugas tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 namun baru terselesaikan pada tanggal 25 Februari 2019, tercantum dalam Perwal 1405 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPD Kota Bandung (Pasal 12 Ayat 2).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menduga hal ini disebabkan karena kompensasi berupa sarana penunjang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dari indikator kompensasi yaitu fasilitas, seperti beberapa pegawai lapangan yang tidak memiliki meja kerja sendiri untuk membuat laporan dan harus berbagi dengan pegawai lain sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan masing-masing. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih rinci dan mencari alternatif pemecahan masalah tersebut yang akan dijadikan topik oleh peneliti dalam skripsi, dengan judul: **“PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPD) KOTA BANDUNG”**

1. **Perumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung?
3. Hambatan apa yang menjadi pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung?
4. Usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung.
7. Menemukan data dan informasi mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung.
8. Mengembangkan data dan informasi mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung.
9. **Kegunaan Penelitian**
10. **Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja.

1. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di BPPD Kota Bandung.